

**ANALISIS MANFAAT DANA PINJAMAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI  
DALAM MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Desa Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi**

**Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**AGUS FERIANTO  
NPM : 1351010136**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Usaha merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling domain dalam proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. dalam kaitanya usapa perlu adanya sebuah modal demi untuk menjalankan roda usaha dan dalam membangun usaha tidak semua pelaku usaha , Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana da memiliki modal dalam menjalnakan usahanya, pinjaman merupakan salah satu alternatif agar pelaku usaha dapat membangun dan memngembangkan usaha, dengan ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk pemberian pinjaman dengan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan, program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat kepada masyarakat secara langsung. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana manfaat dana pinjaman PNPM Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat di desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung tengah?, Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pinjaman PNPM Mandiri di desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung tengah?. Untuk mengetahui manfaat dana pinjaman PNPM dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Karang Jawa dan untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Karang Jawa .Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif , populasi yang digunakan dalam penelitian berjumlah 158 dengan pengambilan sampel sebesar 10%, dari jumlah populasi yaitu 16 responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode analisa yang digunakan dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *pertama*, Proses pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri bermanfaat dalam penigkatan usaha masyarakat ,dengan pengembangan dana pinjaman sebagai permodalan masyarakat untuk mengembangkan usaha berupa usaha mickro, baik perdagangan, pertanian, peternakan dan lainnya, dengan pelatihan penggunaan dana pinjaman dan pemberian bunga ringan yaitu 10% per 10 bulan masyarakat tidak diberatkan, terbukti dengan banyaknya usaha masyarakat yang berkembang dengan adanya pinjaman PNPM Mandiri,. *Kedua* , Penerepan dana pinjaman PNPM Mandiri masih belum sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam, karena dalam pemberian Pinjaman PNPM Mandiri masih menggunakan sistem bunga dengan penetapan Bunga 10% dari jumlah pinjaman.

Kata kunci: Pinjaman PNPM Mandiri peningkatan usaha masyarakat

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Ferianto

NPM : 1351010136

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“(Analisis Manfaat Dana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Study: Di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Mei 2020

Penulis,



Agus Ferianto

NPM. 1351010136





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

: ANALISIS MANFAAT DANA PINJAMAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM  
PERPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Desa  
Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji,  
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama

: Agus Ferianto

NPM

: 1351010136

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**H. Supaijo, S.H., M.H.**

NIP. 196503121994031002

  
**Dedi Satriawan, M.Pd.**

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
**Madnasir, S.E., M.S.I.**

NIP. 197504242002121001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS MANFAAT DANA PINJAMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Desa Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah)"**, disusun oleh: **Agus Ferianto**, NPM: **1351010136**, Jurusan: **Ekonomi Syariah (ES)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat/14 Agustus 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I.**

**Sekretaris : Muhammad Fikri Nurgraha Kholid, M.Pd.**

**Penguji I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.**

**Penguji II : Dedi Satriawan, M.Pd.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

NIP 198608012003121001



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2).*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 104

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabiil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang Ayahanda Sularto, dan Ibunda Boniah yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa mendoakan ku disetiap langkah ku demi tercapainya cita-citaku. Terimakasih Mak dan Bak atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Adiku Ana Aisya Putri dan saudara-saudara saya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta turut mendoakan untuk mencapai keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang ku banggakan, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Agus Ferianto lahir pada tanggal 28 Juli 1995 di Dusun Tanjung Sari Kelurahan Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, merupakan anak Pertama dari Tiga Bersaudara dari pasangan Bapak Sularto dan Ibu Boniah.

Pendidikan pertama kali di SDN 2 Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan tamat pada tahun 2007. kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 2 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Pramuka Bhakti dan tamat pada tahun 2013, dan terakhir menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah pada saat itu dan sekarang FEBI pada Program Studi Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Manfaat Dana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.S.I. selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. H. Supaijo, S.H, M.H. Selaku Pembimbing I dan Dedi Satriawan, M.Pd. Selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2013 khususnya kelas F.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 8 Mei 2020

Penulis,



Agus Ferianto  
NPM. 1351010136



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GABAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Metode penelitian .....	13

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan .....	21
2. Konsep Pemberdayaan .....	22
3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri .....	24
4. KEP No. 25 /VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri .....	36
5. Komponen dan Harmonisasi Program.....	39
6. Pengelolaan Program.....	41

### B. Teori Usaha

1. Pengertian Usaha .....	44
2. Tujuan usaha .....	46
3. Jenis-Jenis Usaha .....	48

C. Teori Pinjaman Dalam Ekonomi Islam	
1. Pengertian Pinjaman atau Hutang Piutang (Qard).....	54
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (Qard) .....	57
3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang(Qard) .....	59
4. Ketentuan dalam Hutang-piutang/ <i>Qardh</i> .....	62
D. Tinjauan Pustaka .....	67
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Karang Jawa .....	70
B. Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Anak Ratu Aji ...	76
C. Deskripsi Data Penelitian .....	92
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Manfaat Dana Pinjaman PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Masyarakat di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab.Lampung Tengah.....	110
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Unit PNPM Mandiri Perdesaan Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji , Kab. Lampung Tengah.....	115
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Rincian Lahan Desa Karang Jawa.....	71
3.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan jenis kelamin Desa Karang Jawa .....	72
3.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Desa Karang Jawa .....	73
3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Desa Karang Jawa .....	73
3.5 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Karang Jawa ...	74
3.6 Kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa .....	78
3.7 Kepengurusan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan .....	79
3.8 Kepengurusan Tim Verifikasi Perguliran .....	79
3.9 Kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan .....	80
3.10 Penanggung Jawab Dan Pembina Unit PNPM Mandiri Pedesaan Tingkat Desa .....	80
3.11 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2020.....	86
3.12 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan kategori Pemula Des Karang Jawa Tahun 2019-2020 .....	87
3.13 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kategori Berkembang Desa Karang Jawa Tahun 2019-2020 .....	88
3.14 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kategori Siap Desa Karang Jawa Tahun 2019-2020 .....	90
3.15 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok pemula .....	98
3.16 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok berkembang .....	101
3.17 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok maju.....	103
4.1 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok Pemula.....	109
4.2 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok Berkembang .....	110
4.3 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mendapat Pinjaman PNPM Mandiri Kelompok Maju .....	111

## DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Stuktur Kelembagaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan .....82





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 01 Pedoman wawancara

Lampiran 02 Pedoman observasi

Lampiran 03 Pedoman dokumentasi

Lampiran 04 Surat izin riset

Lampiran 05 Surat Balasan Riset

Lampiran 06 Surat permohonan pengajuan pinjaman PNPM Mandiri

Lampiran 07 Syarat-syarat pengajuan pinjaman di PNPM Mandiri

Lampiran 08 Surat pernyataan penyerahan agunan

Lampiran 09 Dokumentasi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut terlebih dahulu akan diberikan penegasan judul, dalam penegasan judul penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari kekeliruan pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Manfaat Dana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study:Dana Pinjaman PNPM Mandiri di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah)**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. Manfaat adalah tingkat dimna pengguna percaya , bahwa menggunakan produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang dari penggunaan produk<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006), h..44.

<sup>2</sup> *Idid*.h.256.

3. Pinjaman dalam kajian bahasa arab ada beberapa istilah untuk penyebutan pinjam meminjam atau utang piutang yakni *dain*, *ariyah*, dan *qard* yang pada dasarnya adalah sama. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan utang adalah “uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”. Sedangkan piutang adalah “uang yang dipinjamkan kepada orang lain dapat ditagih dari orang lain.”<sup>3</sup>
4. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pinjaman pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat Dalam upaya Penanggulangan kemiskinan.<sup>4</sup>
5. Menurut Hughes dan Kapoor *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>.Naf'an,*Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 Cetakan Pertama) , h.55.

<sup>4</sup> Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, ( Direktorat Jendral Cipta Karya: Jakarta Th. 2007), h.11.

<sup>5</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.



6. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sedangkan Islam adalah suatu agama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan baik hubungan manusia dengan Tuhan, ataupun manusia dengan sesama makhluk Tuhan.<sup>6</sup> Jadi Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dikendalikan oleh nilai-nilai akidah Islam ,Ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks sebagai akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas.

Dari penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tentang Analisis Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan objektif**

Berpendapat dari fakta dan data yang ada di lapangan Persoalan kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan masyarakat bangsa Indonesia, telah menjadi persoalan dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang, Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, ( PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), h.15.

program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dana pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri dengan tema Analisis Pengaruh Dana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan penulis, mengingat banyaknya referensi yang mendukung Skripsi ini, sehingga mempermudah peneliti dalam mencari sumber dan *literature* guna menyelesaikan skripsi ini.
- b. Penulis ingin menyesuaikan dengan fenomena apa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan prodi Ekonomi Syariah.

## C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan ketidak-mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Persoalan kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan masyarakat bangsa Indonesia, telah menjadi persoalan dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk, terlepas apaka itu negara berkembang maupun sedang berkembang, Disisi

lain kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi<sup>7</sup>.

Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan.<sup>8</sup> Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpm, 2010), h. 299.

<sup>8</sup> Etomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cetakan 1, h. 69.

<sup>9</sup> Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional*, tt. h. 2.



Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduknya.<sup>10</sup>

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana pinjaman atau hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan dana pinjaman PNPM Mandiri mengacu pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga aturan perguliran dan Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan yang telah Disepakati,

---

<sup>10</sup> *Ibid* .h.3.

<sup>11</sup> *Ibid* .h.5.

ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan sedangkan dana Simpan Pinjam Perempuan hanya digunakan untuk penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan, tidak diperbolehkan memberi pinjaman secara individu, kelompok yang diberi pinjaman meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka serta kelompok usaha bersama dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin, kelompok pinjaman bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang dan siap, kegiatan verifikasi dilakukan dengan jenis kelompok, adanya perjanjian pinjaman Unit Pengelola Kegiatan dan kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur dan kelompok pengelola) dan siklus usahanya, pembebanan biaya usaha sesuai dengan dana pasar pinjaman di wilayah masing-masing, kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan Insentif Pembayaran Tepat Waktu pada akhir masa pinjaman sebagai stimulant.<sup>12</sup>

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan Kelompok

- a. persyaratan kelompok yang mengajukan pinjaman dana bergulir minimal kategori berkembang
- b. kelompok yang telah lunas pinjaman dan mengajukan pinjaman lagi harus dinilai dari kondisi pinjamannya

---

<sup>12</sup> nnDirektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir ,tt. h.11.

- c. kelompok *Executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *chanelling* dan pinjaman *Executing* dikelola mandiri.

Dalam penentuan pinjaman PNPM Mandiri membagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok simpan pinjam pemula, berkembang dan maju. sub terkecil dalam pengembangan dana pinjaman PNPM Mandiri adalah kecamatan dan UPK menjadi lembaga yang berperan dalam penyaluran dana ke masyarakat melalui kelompok-kelompok simpan pinjaman.

Kecamatan Anak Ratu Aji memiliki 5 desa yaitu Gedung Sari, Karang Jawa, Gedung Ratu, Srimulyo dan Bandar Putih Tua. Setiap Desa memiliki jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berbeda-beda, dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Anak Ratu Aji**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2020**

No	Desa	Kelompok Simpan Pinjam Perempuan				
		Pemula	Berkembang	Siap	Jumlah	Jumlah anggota
1	Gedung Sari	10	45	6	61	253
2	Karang Jawa	17	46	4	67	267
3	Gedung Ratu	14	41	7	62	273
3	Srimulyo	12	36	5	53	261
4	Bandar putih Tua	11	41	6	58	239
5	Sukajaya	13	23	5	41	265

*Sumber data* : Dokumentasi Unit Pengelola kegiatan (UPK) kec. Anak Ratu Aji

Dalam kaitannya belum semua anggota peminjam memiliki usaha sesuai dengan apa yang diinginkan dari program PNPM Mandiri, dalam hal ini ada

<sup>13</sup> Supri ( Ketua Unit Pengelola Kegiatan ) , *Wawancara* , Pada Tanggal 4 Januari 2020, Pukul 10:00 WIB.



sebagian anggota peminjam yang memiliki usaha di kecamatan Anak Ratu Aji yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

**Tabel 1.2**  
**Daftar Peminjam Yang Memiliki Usaha Di kecamatan Anak Ratu Aji**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2020**

No	Desa	Jumlah peminjam yang memiliki usaha			
		Pemula	Berkembang	Siap	Jumlah
1	Gedung Sari	43	58	26	127
2	Karang Jawa	50	103	26	158
3	Gedung Ratu	51	72	34	157
3	Srimulyo	45	103	23	171
4	Bandar putih Tua	39	80	25	144
5	Sukajaya	39	76	20	135

*Sumber data* : Dokumentasi Unit Pengelola kegiatan (UPK) kec. Anak Ratu Aji

Usaha merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling domain dalam proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Muhammad Bin Al-Syaibani, seperti dikutip oleh Adiwarmanto Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> karsono ( Sekertariat Unit Pengelola Kegiatan ) , *Wawancara* , Pada Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 09:00 WIB.

<sup>15</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 61.

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.<sup>16</sup>

Menurut pandangan Islam orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2).*<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 104

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 10.

Pemberian pinjaman yang baik untuk menolong orang yang lemah, dalam hal ini pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan adalah pinjaman yang dengan pemberdayaan masyarakat dengan tujuann menanggulangi kemiskinan.

Namun pada kenyataan dilapangan tidak semua pemberian dana pinjaman digunakan sesuai peruntukan dari PNPM Mandiri yang seharusnya dana pinjaman di gunakan untuk hal yang produktif tetapi ada anggota yang mempergunakan dana pinjaman untuk konsumtif, salah satunya yaitu Ibu Boniah, berdasarkan wawancara dengan Ibu Boniah, beliau mengatakan :

“sebelumnya tidak ada sosialisasi atau rapat dari desa serta dari Unit PNPM Mandiri Perdesaan mengenai peruntukan dana pinjaman dari PNPM Mandiri yang saya diketahui hanyalah pinjaman tersebut sama seperti pinjaman pada umumnya setelah mendapatkan pinjaman tersebut kemudian saya harus membayar setiap bulan selama 10 bulan”.<sup>19</sup>

Permasalahan tersebut di atas tentunya diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, mengingat pinjaman yang di berikan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, salah satu yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah kurangnya peran PNPM Mandiri Perdesaan serta masih lemahnya sumber daya dan kesadaran pada masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat tentang keperuntukan dana pinjaman Unit PNPM Mandiri Perdesaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan tersebut apakah sesuai dengan tujuan yaitu memberdayakan, memberikan modal untuk

---

<sup>19</sup> Boniah, (Anggota Peminjam Kelompok Melati 3), *Wawancara* , Pada Tanggal 15 Oktober 2019,



menumbuh-kembangkan usaha-usaha masyarakat miskin, mampu meningkatkan pendapatan, dan apakah sesuai dengan ekonomi Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Manfaat Dana Pinjaman (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

#### **D. FOKUS PENELITIAN**

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada program PNPM Mandiri yaitu berupa pinjaman dana bergulir yang di berikan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dengan melihat bagaimana manfaat penggunaan dana pinjaman tersebut dan bagaimana dana pinjaman tersebut dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap dana pinjaman PNPM mandiri

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat dana pinjaman PNPM Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah?

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pinjaman PNPM Mandiri di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui manfaat dana pinjaman PNPM terhadap peningkatan usaha masyarakat di Desa Karang Jawa
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Karang Jawa dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penelitian ini.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini dapat menambah disiplin keilmuan teori dan praktek yang berkaitan dengan pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan yang baik dan sesuai dengan Ekonomi Islam.
- b. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dan pertimbangan PNPM Mandiri Perdesaan pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan yang memiliki peran penting untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk mendapatkan disiplin ilmu tentang pengembangan pemikiran Ekonomi Islam secara Universal.

## H. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab, ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan yang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini akan membahas tentang penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas tentang pengaruh dana pinjaman PNPM Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam perpektif Ekonomi Islam di Desa Karang Jawa, Kec.Anak Ratu Aji, Kab.Lampung Tengah.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses

---

<sup>20</sup> Nurbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara,, 2007), h. 1-3.

<sup>21</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2004), h. 5.

<sup>22</sup> Lexy J meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h.

penyederhanaan data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>23</sup> Skripsi ini menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang pengaruh dana pinjaman PNPM Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Karang Jawa, Kec.Anak Ratu Aji, Kab.Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta dan disajikan dengan tujuan tertentu.<sup>24</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan atau yang bersangkutan yang diperlukan atau data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan anggota peminjam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Karang Jawa, kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.<sup>26</sup>

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain Al-

---

<sup>23</sup>Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*,(Jakrata:Gramedia, 2005), h. 7.

<sup>24</sup> *Ibid*,h.197.

<sup>25</sup> H.Moh.Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), h.57.

<sup>26</sup> *Ibid*. h. 58.



Qur'an, dokumen, peraturan, kebijakan Pemerintah, keputusan Presiden, Buku kepustakaan, Jurnal, dan sebagainya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,<sup>27</sup>

Populasi bukan sekadar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi pada penelitian ini adalah 45 kelompok peminjam dengan 267 anggota kelompok peminjam dana PNPM mandiri di Desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari objek yang mewakili populasi, adapun pengambilan harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi, Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan *sampling*, menurut Suharsimi Arikunto jika apabila populasi penelitian kurang dari 100, lebih baik sampel setengah dari jumlah populasi, selanjutnya jika populasi penelitian lebih dari 100 maka lebih baik sampel diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ,R&D* ,(Bandung : alafbeta, 2007) h.80

<sup>28</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 31.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>29</sup> Sampling yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas sampling dengan teknik sample yang di pakai yaitu *random sampling* .

*Random sampling* adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk di tetapkan sebagai anggota sampel .<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka peneliti menggunakan persentase pengambilan sampel sebesar 10%-15% dengan populasi 158 orang anggota peminjam dana PNPM Mandiri, maka  $10\% \times 158 \text{ orang} = 15.8$  dengan pembulatan 16 orang anggota sampel .

#### 4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan atau suatu proses pengadaaan data primer untuk keperluan penelitian.<sup>31</sup> Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>32</sup> Teknik pengamatan dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung, hal ini

---

<sup>29</sup> *Ibid.*34.

<sup>30</sup> *Ibid.*32.

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Bogor :Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 174.

<sup>32</sup> *Ibid.* H.175.

untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses pemberian pinjaman dan bagaimana penerapan pinjaman dari anggota kelompok dalam peningkatan usaha anggota kelompok peminjam.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara, pihak pertama berfungsi sebagai penanya disebut juga sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*Information supplier*) interviewer atau informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya,<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana pewawancara sudah menyipakan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik, wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden tetapi susunan kata dan urutannya di sesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat luwes susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan di ubah saat

---

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), H.131.

wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang antara lain:

1. Ketua UPK Kecamatan Anak Ratu Aji
2. Kepala Desa Karang Jawa
3. Penerima pinjaman yang memiliki usaha

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan ,gambar,atau karya-karya monumental dari seseorang . dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian , sejarah kehidupan,cerita,biografi, peraturan,kebijakan,dokumen gambar berupa foto ,gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berupa karya dapat berupa gambar, patung, film,dan sebagainya.Study dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara .Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika di dukung oleh sejarah pribadi atau bentuk lain dari metode observasi .<sup>35</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun

---

<sup>34</sup> Dedi Mulyana . *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung : P.T.Remaja Rosdakarya 2004) H .180.

<sup>35</sup> *Ibid* .h. 82.



menurut aturan tertentu.<sup>36</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
- d. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan<sup>37</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisa adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>38</sup>

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, kemudian pada yang umum, kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan

---

<sup>36</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana ,2011), H.141.

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung :PT.Cipta Aditia Bakti ,2004 ) H..126

<sup>38</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 103.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memperkuat atau memberdayakan kelompok masyarakat lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan itu sendiri yakni terciptanya masyarakat yang mampu secara fisik, sosial, maupun ekonomi.<sup>39</sup>

Mengacu pada UU No 22/1999 pemberdayaan berarti pengikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan (penjelasan pasal 92 ayat 1 UU 22/1999). Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi namun juga kepemilikan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Rosdiana Mustafa, *et al.*, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2009,,) Cetakan Pertama h. 120.

<sup>40</sup>Endang Sutisna, *pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016,) hal. 5.

Dari dua pengertian pemberdayaan tersebut di atas peneliti dapat menarik benang merah bahwa pemberdayaan adalah upaya- upaya yang dilakukan kaum pemberdaya untuk menjadikan kaum yang lemah menjadi berdaya.

Ada dua alasan pentingnya mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis. Secara intrinsik, setiap warga masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap isu pembangunan, sedangkan secara pragmatis, pemerintah selaku perencanaan dapat menggali aspirasi masyarakat.<sup>41</sup> Menelisik dari beberapa pendapat tersebut diatas tidak ada salahnya jika dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pemerintah menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat selaku objek pembangunan lebih mengerti apa yang mereka butuhkan, dengan begitu pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat tanpa mengesampingkan sumberdaya lokal.

## 2. Konsep pemberdayaan

Konsep pemberdayaan muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan. Menurut Amartya Sen dalam Sumodingrat, kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang berkelanjutan. Sebagaimana program-program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan yang tidak kunjung menunjukan perubahan yang berarti. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-

---

<sup>41</sup> *Ibid* ,h.7.

alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai, demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai.<sup>42</sup>

Setelah kegagalan program-program yang telah dicanangkan, seperti program Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Beras Miskin, yang dinilai kurang efektif, maka hadirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, sekaligus memperluas pilihan dari setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan.<sup>43</sup>

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah

---

<sup>42</sup>Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Volume II, Nomor 1, Juni 2010, h.44.

<sup>43</sup> *Ibid*,h.46.

pemberdayaan masyarakat, maka menurut friedman , pemberdayaan harus di mulai dari rumah tangga.<sup>44</sup>

Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial,dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.<sup>45</sup>

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri

#### a. Definisi PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h.48.

<sup>45</sup> Friedman , *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. (Cambridge Mass: Blackwell Publisher, 1992), h.165-166.



dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>46</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan, yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan yang dihasilkan diantaranya adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin efisien dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.<sup>47</sup>

Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan kelembagaan kerja sama antar desa.

#### b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

<sup>46</sup> nnDirektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir,tt. Hal.4.

<sup>47</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/114957-ID> pelaksanaan program nasioal pemberdayaan pdf Diakses pukul 11:18,29 Desember 2019.

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan parsipatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.<sup>48</sup>

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Dan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah adanya tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan.<sup>49</sup>

#### c. Tujuan dan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdeaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan

<sup>48</sup>Nn.Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir,tt. Hal.4.

<sup>49</sup> Nn.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN, *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, hal 58

usaha skala mikro, penemuan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Tujuan khusus meliputi:<sup>50</sup>

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 3) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- 4) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.
- 5) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 6) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- 7) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Nilai-nilai dasar mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip yang dapat mendorong terwujudnya PNPM Mandiri Perdesaan adalah:<sup>51</sup>

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia, masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- 2) Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.
- 3) Berorientasi pada masyarakat miskin, segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- 4) Parsipatif, masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi.

---

<sup>50</sup> Nn.Direktorat jendral pemberdayaan masyarakat dan desa, petunjuk teknis program operasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.tt.h.6.

<sup>51</sup> *Ibid* ,h.7.

- 5) Demokratis, dalam pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- 6) Transparan dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- 7) Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengetasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.
- 8) Keberlanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

d. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

- 1) Ketentuan dasar pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan diantaranya adalah:<sup>52</sup>
  - a) Kemudahan, dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
  - b) Terlembagakan, dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tatacara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
  - c) Keberdayaan, proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
  - d) Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid* ,h.8.

- e) Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

## 2) Sasaran program

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

## 3) Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana penyimpanan.<sup>53</sup>

## 4) Ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah:

- a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun berjalan
- b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan Dana Simpanan dan Dana Pinjaman Yang Telah Disepakati
- c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota
- d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik
- e) Mempunyai organisasi kelompok dan pengelolaan secara sederhana.<sup>54</sup>

## e. Pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, h.57

<sup>54</sup> Ibid ,h..58.



yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang dijelaskan dalam penjelasan IV tentang jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan, dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif. Dana bergulir adalah seluruh dana program yang dan bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok- kelompok masyarakat.<sup>55</sup>

Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah: memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program, peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah perdesaan, menyiapkan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan dan pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Sasaran dari kelompok kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Nn.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan , *penjelasan X Pengolahan Dana bergulir*.tt., h.4

<sup>56</sup>*ibid* ,h.5.

- 1) Kelompok Simpan Pinjam yang memiliki kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin.
- 2) Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok yang memiliki kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin
- 3) Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut, diantaranya adalah: pelestarian kegiatan dana bergulir, kemudahan akses pendanaan usaha bagi Rumah Tangga Miskin, pelestarian prinsip pengelolaan, pelestarian kelembagaan, dan pengembangan kelompok.

Ketentuan pendanaan atau pengelolaan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga aturan perguliran dan Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat: dana perguliran Unit Ekonomi Produktif dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan Unit Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan, sedangkan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu, kelompok yang

didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka usaha serta kelompok usaha bersama dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok pemula, kelompok berkembang dan siap, kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok, adanya perjanjian pinjaman Unit Pengelola Kegiatan dan kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya, pembebanan biaya usaha sesuai dengan bunga pasar pinjaman di wilayah masing-masing, kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan Insentif Pembayaran Tepat Waktu pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan.<sup>57</sup>

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1) Persyaratan kelompok:

- a) Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana bergulir minimal kategori kelompok berkembang.
- b) Kelompok yang telah lunas mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya.
- c) Kelompok *executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *chanelling* (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *executing* (dikelola secara mandiri).

2) Penentuan jasa pinjaman

- a) Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
- b) Sistem jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*).

---

<sup>57</sup> *Ibid* . h.6.

<sup>58</sup> *Ibid* . h.7.

3) Jangka waktu pinjaman

- a) Untuk kelompok penyalur (*chanelling*) maksimal 18 bulan.
- b) Untuk kelompok pengelola (*executing*) maksimal 36 bulan.

4) Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok:

- a) Kelompok penyalur (*chanelling*) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan
- b) Kelompok pengelola (*executing*) dapat diberikan pola jadwal:
  - 1) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan
  - 2) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan
  - 3) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, bulanan).<sup>59</sup>

f. Pelaksanaan pinjaman bergulir Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan

Mekanisme pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan:<sup>60</sup>

- 1) Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, dilakukan untuk sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan dan dapat memanfaatkan.
- 2) Musyawarah Desa Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan yang persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan dan melakukan persiapan proses lanjutan.
- 3) Musyawarah Dusun, merupakan proses identifikasi kelompok sesuai

<sup>59</sup> *Ibid* .h.7.

<sup>60</sup> *Ibid* . h..8.

dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keadaan anggota, Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitas untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat, dan Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara.

- 4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan, musyawarah ini merupakan tahap penyeleksian ditingkat desa yang meliputi: Penentuan usulan desa untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan. Hasil keputusan ini merupakan usulan desa untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa, dalam penulisan usulan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok Perempuan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Sekilas kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
- b) Gambaran kegiatan serta rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun kedepan, perhitungan rencana kebutuhan dana.
- c) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.<sup>61</sup>

- 5) Verifikasi, tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk selanjutnya didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah:<sup>62</sup>

- a) Penetapan formulir verifikasi: Merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh

---

<sup>61</sup> *Ibid.*h.8.

<sup>62</sup> *Ibid* . h..9.

formulir yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model, (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity), yaitu penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

b) Proses pelaksanaan verifikasi, verifikasi kelompok Simpan Pinjam

Peremuan mengacu kepada beberapa hal diantaranya:

- (1) Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
  - (2) Persyaratan kelompok.
  - (3) Kondisi kelompok simpan pinjam, dengan penilaian: permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, likuiditas (pendanaan jangka pendek).
  - (4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
  - (5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin.
  - (6) Penilaian kategori kelompok
- 6) Penetapan persyaratan, penetapan ini tertuang dalam perjanjian yang meliputi:
- a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman dalam lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system penghitungan jasa menurun atau tetap.
  - b) Jangka waktu pinjaman sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat maksimal 12 bulan.
  - c) Jangka waktu pinjaman sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.
  - d) Angsuran dana langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan .<sup>63</sup>
- 7) Pencairan dana, pencairan dana dapat melalui desa sesuai dengan ketentuan program yang dilampiri Surat Perintah Pengeluaran Barang

---

<sup>63</sup> Ibid ,h.9.



dengan bukti penyaluran kwitansi, pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok, Dalam saat yang bersamaan ketua Tim Pengelola Kegiatan memberikan dana Simpan Pinjam Perempuan untuk setelah dikurangi operasional Unit Pengelola Kegiatan 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kwitansi ini adalah untuk mengetahui bahwa kelompok tersebut telah menerima langsung dari Unit Pengelola Kegiatan dan selanjutnya mengembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan, kelompok membuat perjanjian dengan Unit Pengelola Kegiatan sebagai lampiran kwitansi penerimaan dana, kelompok menyerahkan kwitansi atau tanda terima uang per pemanfaatan kepada Unit Pengelola Kegiatan.

8) Pelestarian kegiatan, dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah:

- a) Adanya dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang produktif dan bertambah jumlah untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
- b) Adanya pelestarian Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada masyarakat miskin dan transparan.
- c) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
- d) Pengembangan layanan kepada masyarakat.
- e) Pengembangan permodalan.<sup>64</sup>

#### 4. KEP No. 25 /VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri

##### a. Strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum

---

<sup>64</sup>Nn.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. tt. Hal 59

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

1) Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: strategi dasar dan strategi operasional.

2) Prinsip dasar PNPM Mandiri

PNPM Mandiri menerapkan prinsip-prinsip dasar diantaranya:

- a) Bertumpu pada pembangunan masyarakat artinya pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b) Otonomi artinya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- c) Desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- d) Berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang beruntung.
- e) Partisipasi artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan<sup>50</sup>.
- f) Kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g) Demokratis artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h) Transparansi dan akuntabel artinya masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- i) Prioritas artinya pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendedayakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas.

- j) Kolaborasi artinya semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.
  - k) Keberlanjutan artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini namun dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
  - l) Sederhana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat.<sup>65</sup>
- 3) Pendekatan PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip- prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

#### 4) Dasar hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan sistem pemerintahan,

---

<sup>65</sup> Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008. Hal 12-13

perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.<sup>66</sup>

## 5. Komponen dan Harmonisasi Program

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Pada hal ini akan di jelaskan tentang:

- a. Kategori Program, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi PNPM-inti dan PNPM-penguatan.
- b. Komponen Program, rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
  - 1) Komponen Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai.<sup>67</sup>
  - 2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
  - 3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*H.14.

<sup>67</sup> *Ibid.*H.16.

- 4) Bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi program-program kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

c. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- 1) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya.
- 2) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.
- 3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyediaan kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

d. Harmonisasi program. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi dan aspek-aspeknya, diantaranya:

- 1) Pemilihan sasaran, Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a) Memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar,
  - b) Tingkat pelayanan dasar rendah.
  - c) Tingkat kapasitas fiskal rendah.
  - d) Memiliki desa/kelurahan terbaik.

Penetapan lokasi PNPM–inti ditetapkan oleh tim pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM–penguatan diarahkan ke lokasi PNPM–

inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.

- 2) Kelembagaan masyarakat yang memiliki tujuan mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai, dan mengakar, efisiensi tatakelola, efektivitas program penanggulangan kemiskinan, mendorong pemerintahan yang tanggap terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya.
- 3) Pendanaan, harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulanagn kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri, tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktifitas yang tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program.

## 6. Pengelolaan Program

Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sosialisasi.

### a. Persiapan

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri dipusat dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri yang meliputi kebijakan umum dan



pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan oleh tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk sekretariat tim koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk satuan kerja pelaksanaan program.

#### b. Perencanaan partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota.

Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan yang bertujuan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki dan perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif ini dimulai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat, pertemuan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya untuk identitas masalah, potensi dan kebutuhan.

#### c. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan flaksibilitas oleh perangkat pemerintah yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan setelah ada keputusan tentang pengelolaan dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknik terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.<sup>68</sup>

#### d. Pengelolaan keuangan masyarakat

Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Spesimen tanda tangan dalam rekening tersebut harus melibatkan

---

<sup>68</sup> *Ibid.* H.25.

minimal tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah masyarakat.

Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, bon atau nota pembelian. Pengelolaan uang masyarakat menganut prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelola dana non-bergulir dan dana bergulir. Pengelolaan dana non-bergulir dilakukan dengan melakukan pencatatan pembukuan berdasarkan aliran kaas (*cashflow basis*), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana bergulir harus dilakukan ditingkat UPK atau lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/pembukua sederhana, termasuk penyusunan neraca dan laba rugi.

Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat melakukan diversifikasi pelayanan yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*H.40.

## B. Teori Usaha

### 1. Pengertian Usaha

Usaha merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling domain dalam proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Muhammad Bin Al-Syaibani, seperti dikutip oleh Adiwarman Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.<sup>70</sup>

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.<sup>71</sup>

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan

---

<sup>70</sup>Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 61.

<sup>71</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.<sup>72</sup>

## 2. Tujuan Usaha

### a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat* (*primer*) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, *bajiat* (*sekunder*) dan *kamaliat* (*tersier* atau pelengkap).<sup>73</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, ( Jakarta: Kencana, 2003),h. 10.

<sup>73</sup> Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75

<sup>74</sup> Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. (Jakarta : Yayasan ilmu Sosial) h. 55.

Ada 3 kategori pendapatan yaitu :<sup>75</sup>

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja, Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.008.000 dan Upah Minimum Kabupaten atau kota di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.433.000.<sup>76</sup>

*b. Untuk kemaslahatan keluarga*

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-

---

<sup>75</sup> Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 58.

<sup>76</sup> Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah 2020



masing.<sup>77</sup>

*c. Usaha untuk bekerja*

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

*d. Untuk memakmurkan bumi*

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib al Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Memakmurkan bumi
- 2) Menyembah Allah
- 3) Khalifah Allah.

*3. Jenis- Jenis Usaha*

*Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.*

*a. Usaha Mikro*

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau

---

<sup>77</sup> Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h.75.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 76.

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>79</sup>

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### b. Usaha kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang

---

<sup>79</sup>Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. h. 2

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 5.

ini.<sup>81</sup>

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-benda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.<sup>82</sup>

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.<sup>83</sup>

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

---

<sup>81</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42

<sup>82</sup> Disperindag, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, ( Pekanbaru: Kanwil desperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke- 1, h. 84.

<sup>83</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 365

- 1) Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi pertenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.
- 2) Pedagang kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersil yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.<sup>84</sup>

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang bersifat informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedang formal ialah sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha atau badan usaha.

Karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F. With adalah antara lain :

- 1) Usaha kecil cenderung mengelompok dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah meliputi (perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang syarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk memperoleh pendapatan.
- 2) Jatah pendapatan manager pemilik yang relatif terlalu besar terhadap para manager serta investor lain. Karena demikian besarnya hingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.

---

<sup>84</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 43.

- 3) Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar kepada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.
- 4) Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.<sup>85</sup>

Pembangunan industri kecil mempunyai arti yang strategis yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan dengan demikian perkembangan sector industri akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Banyak cara yang dilakukan untuk menumbuh-kembangkan kehidupan pengusaha kecil dan koperasi dalam konteks perekonomian daerah Riau. Mulai dari anggaran pemerintah sampai pengembangan kemitraan, alternatif kedua masih memerlukan kajian lebih jauh lagi mengingat pengembangan kemitraan melalui penggunaan dana Badan Usaha Milik Negara, kelompok jibran, dan pengusaha besar daerah (Badan Permusyawaratan Desa) masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan koperasi untuk memacu laju pertumbuhan usaha dan ekonomi daerah serta mencermati keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi yang ada di daerah ini hendaknya konsepsi ekonomi kerakyataan dan implementasikan dalam bentuk kebijakan program pembangunan daerah

---

<sup>85</sup> Jhon A Welsh Dkk, *Badan Otonomi Ekonomika Edisi Mei-Agustus*, (jakarta:Grafindo Press,1997), h. 39.

secra konsisten.<sup>86</sup>

c. *Usaha menengah*

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>87</sup>

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/ 1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing- masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
- 3) Milik Warga Negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

---

<sup>86</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2001), h. 42.

<sup>87</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Managemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alvabeta, 2010), h. 268.

<sup>88</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 46.



perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

- 5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

*d. Usaha besar*

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>89</sup>

### **C. Teori Pinjaman atau Hutang-piutang dalam Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Pinjaman atau Hutang Piutang (Qard)**

Dalam kajian bahasa arab ada beberapa istilah untuk penyebutan pinjam-meminjam atau utang-piutang yakni *dain*, *ariyah*, dan *qard* yang pada dasarnya adalah sama. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dengan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dapat ditagih dari orang lain.<sup>90</sup>

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan

---

<sup>89</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. h.2.

<sup>90</sup> naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, cetakan pertama, h.55.

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>91</sup> Islam tidak membenarkan adanya bunga, didalam Islam sendiri bunga disebut dengan riba. Riba menurut Bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan, riba juga berarti *an-nama* yang berarti tumbuh atau berkembang.<sup>92</sup>

Terdapat pada QS. Al- Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010. h.96.

<sup>92</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 240

<sup>93</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 75.

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernaikah tersirat anjuran bekerja dan meraih apa yang dinaikahkan, karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau anda tidak memiliki, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengeplotasi kebutuhannya.<sup>94</sup>

Pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembunga uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>95</sup>

Islam mengakui pinjaman konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlakukan, yakni pada dasarnya adalah bersifat *fisiologis*, namun *standarisasi basic fisiologic* manusia yang relatif pada masing-masing segmen kehidupan masyarakat, menimbulkan kecenderungan manusia untuk bersikap *imitatif* dan berlaku *over acting*. Suatu negara Islam ada anggapan bahwa kredit *konsumtif* semata-mata akan diambil untuk memenuhi kebutuhan sesungguhnya, karena itu bila si peminjam benar-benar dalam kesulitan, pelunasan dapat ditunda, bahkan dalam keadaan luar biasa pengurangan hutang sangat di anjurkan.<sup>96</sup> Tetapi

<sup>94</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 587.

<sup>95</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 302

<sup>96</sup>Mustofa, "Mark Up, Bai'bi Tsaman Ajil Dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam". *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No1 juni 2010, h. 12.

Islam menganjurkan untuk menerima pembayaran sukarela yang berlebih dari sejumlah pokok pinjaman, karena itu bukan bunga.<sup>97</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemberian pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam diperbolehkan adanya pinjaman dengan tidak ada tambahan dalam pengembalianya yaitu berupa bunga karena Islam melarang adanya praktek riba sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275, namun jika kelebihan dari pengembalian itu atas dasar sukarela itu tidak termasuk bunga.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (Qard)

### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah ((5): 2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya(QS:Al-Maidah:5:2)<sup>98</sup>*

Q.S Al-Hadid (57): 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(QS:Al-Hadid :57:11)<sup>99</sup>*

<sup>97</sup> Muhamad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: dhana bhakti wakaf), h. 217

<sup>98</sup> *Ibid*, h.104

<sup>99</sup> *Ibid* .h.224.

Penggunaan istilah pinjaman yang baik di dalam Al- Qur'an guna memotivasi untuk berinfaq pada jalan kebaikan. Pinjaman yang baik disini berarti memberi pinjaman dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.<sup>100</sup>

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: “Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.” (HR Al-Bukhaari no. 2387)

Sunnah Rasulullah SAW. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ

“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.” (HR. Ibnu Majjah no. 2400)

Nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaanya didunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti. HR. Muslim<sup>101</sup>

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. I, h. 140.

<sup>101</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (cet. 1 ,Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka,1991), hal.126

### 3 Rukun Dan Syarat Hutang Piutang(Qard)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *qard* hanyalah ijab dari yang meminjam barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *qard*. Menurut jumhur ulama, rukun *qard* yaitu sebagai berikut:

a. Mu'jir atau peminjam dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Inisiatif sendiri bukan paksaan
- 2) Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak *mukatab* tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- 3) Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

b. Musta'jir atau yang meminjamkan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
- 2) Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.

c. Mu'ar yaitu barang yang dipinjamkan dengan syarat sebagai berikut :



- 1) Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad „ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
- 2) *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
- 3) Manfaat *mu'ar* adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad ariyah pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan seperti manfaat alat musik.
- 4) *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad „ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan

d. Shighat yaitu sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>102</sup>

Adapun syarat-syarat ariyah berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu peminjam, orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan shighat.<sup>103</sup>

b. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- 1) Baligh, Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat ariyah, melainkan cukup *mumayyiz*.
- 2) Berakal, Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- 3) Tidak *mahjur alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah „ariyah yang dilakukan oleh orang yang *mahjur alaih* yakni orang yang dihalangi *tasarruf-nya*.
- 4) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek ariyah adalah manfaat bukan benda.

<sup>102</sup> Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : bumi aksara ,2010 )h. 242

<sup>103</sup> Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010),h.471.

c. Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*) maka *Qard* hukumnya tidak sah.
- 2) Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul* yang *rajih* dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri *Qard* tanpa persetujuan wali.

d. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan.

Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam yaitu :

- a) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
- b) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam

---

<sup>104</sup> *Ibid*, h.472.

pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini „ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.

- 2) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara. Apabila barang tersebut diharamkan maka qard hukumnya tidak sah.
- 3) Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

e. *Shighat* dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan aku pinjamkan kepadamu, atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan pinjamkan kepadaku dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

4. Ketentuan dalam Hutang-piutang/*Qardh*

Beberapa ketentuan hukum dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak boleh ada tambahan pengembalian

Akad *al-qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*. Konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai.

Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, dinyatakan bahwasannya “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”<sup>105</sup>

Allah juga tegas memberikan suatu aturan dalam menjalankan hutang-piutang yang merupakan bagian dari ekonomi, dan ketegasan aturan transaksi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa’ ayat 29:4.*<sup>106</sup>

Salah satu transaksi yang *bathil* adalah transaksi yang mengandung riba. Menurut Abu Sura’i Abdul Hadi yang dimaksud dengan riba adalah suatu tambahan yang diberikan atas suatu pinjaman sebagai imbalan atas pokok pembayaran yang telah disyaratkan. Riba yang dimaksud diatas adalah adanya kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran, serta adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.<sup>107</sup>

Bunga atau *riba* menurut loghat, riba artinya bertambah, berlebih, atau menggelembung. Riba berasal dari bahasa arab yang berarti

<sup>105</sup> Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015, hlm. 70-71.

<sup>106</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba’at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur’an dan Terjemah Raja Fadh) hal 122

<sup>107</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (cet. 1 ,Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka,1991), h.23.

bertambah atau lebih, menurut istilah syara' yang dimaksud dengan riba ialah perjanjian pinjam meminjam uang antara dua orang dengan syarat ada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu bagi orang yang menghutangnya.<sup>108</sup>

Ada dua macam penggolongan riba, diantaranya adalah:

*Riba nasiah, riba fadl.* Yang dimaksud dengan *riba nasiah* adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu, sebagai imbalan dari imbalan dari jangka waktu tersebut. Riba nasiah juga sering disebut dengan riba jahiliyah yang mana riba ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat arab jahiliyah, riba ini juga disebut dengan riba qardhi karena terjadi pada masalah hutang piutang.<sup>109</sup>

*Riba Fadli* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan berbagai bahan makanan pokok dengan barang yang sejenis karena tidak sama kualitasnya. Riba fadli ini juga sering disebut dengan riba buyu' karena sering terjadi pada jual beli.

Ibnu Hajar Al-Malik dalam kitabnya Az-Zawajir: Riba Nasiah itulah yang mashur dikalangan kaum Rasulullah. Bila seorang meminjamkan harta dari mereka meminjamkan harta (uangnya) kepada orang lain hingga waktu yang dijanjikan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari si peminjam itu pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedang uang yang dipinjam semula tetap

---

<sup>108</sup> Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk, *FIKIH ISLAM*, (cet.3. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 379.

<sup>109</sup> *Ibid.* H. 380.

sebanyak itu dan juga tidak dikurangi.

Menurut pendapat DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa dengan adanya ketentuan bunga yang telah ditentukan secara pasti oleh bank, hakekatnya tindakan tersebut termasuk dhalim, khususnya kaum peran pemilik modal terhadap nasabahnya dan jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat ajaran Al-Qur'an "... Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba".

Bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam akad pinjam-meminjam, yang dalam istilah syara' riba nasiah, suatu bentuk riba yang menjadi sebab turunya ayat 130 dari surat Al- Imran<sup>110</sup>.

Prof. DR. Muhammad Abu Zahra yang juga ditegaskan oleh Abu A'la Al Maududi serta Prof. DR. Muhammad Abdullah al-Arabi menyatakan bahwa bunga yang ada dalam bank atau koperasi adalah riba nasiah yang diharamkan dalam islam.<sup>111</sup>

Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamannya yaitu:

- 1) Keumuman nash dari kitabullah dan sunnah Rosul yang melarang perbuatan riba,
- 2) Hadits yang khusus melarangnya, yakni sabda Rasulullah SAW:

إِذَا قَرْضَ أَحَدِكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِ إِلَى يَدِهِ أَوْ حَمَلُهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ

جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

<sup>110</sup> Ibid.H.382.

<sup>111</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*, (Bandung :Al-Ma'arif , 1975), Hal 28



*Artinya :“Apabila salah seorang diantara kalian memberi pinjaman, laluia diberi hadiah atau diajak menunggangi kendaraan orang yang meminjam, jangan ia menungganginya dan jangan menerima hadiah tersebut.Kecuali jika kebiasaan tersebut sudah berlangsung antara kalian sebelum itu’.*<sup>112</sup>

- 3) Ijma’ yang disebutkan oleh banyak ulama, jika keuntungan yang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya itu tidak dijadikan persyaratan, maka itu tidak apa-apa.Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW.Yang pernah meminjam dari Abu Bakar, lalu beliau mengembalikannya lebih banyak. Beliau bersabda: *“sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya”*

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad<sup>113</sup>

- b. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan.

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidak mampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa

<sup>112</sup> *Ibid.*H.80.

<sup>113</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014, hlm. 342.

denda.<sup>114</sup>

c. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur.

Sesuai prinsip syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan/penanggungan (*quarantee*) yang diberikan oleh seorang penjamin/ penanggung (guarantor) baik penjamin orang perseorangan/ individu maupun penjamin korporasi.<sup>115</sup>

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami.

Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh L.Mimbar, “Peran Badan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat”. Menurut penelitian ini perkembangan Badan Masyarakat dan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*H.346

<sup>115</sup> *Ibid.*H.347.

Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam mengurangi kemiskinan, dengan berbagai cara penanggulangan yang dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.<sup>116</sup>

2. Penelitian Sri Hery Susilowati, “Pendekatan Skala Ekuivalensi Untuk Mengukur Kemiskinan”. Menurut penelitian ini perlukannya pendekatan yang khusus dalam meneliti sumber kemiskinan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana penyebab kemiskinan di masyarakat secara mendetail.<sup>117</sup>
3. Penelitian oleh Dimas, “Pemberdayaan Kaum Dhuafa Melalui Zakat,” Dalam penelitian ini pengembangan zakat untuk pemberdayaan kaum dhuafa sangat berperan dalam mengurangi angka kemiskinan, dengan pemberian pelatihan kerja dan pemberian modal dalam menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>118</sup>
4. Penelitian oleh Anitha Nurak, “Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah”. Mengatakan bahwasanya Efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita setelah melihat mekanisme pembagian kinerja ini, terlihat ada beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang terlihat mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dari PNPM Mandiri Perdesaan ini.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> L.Mimbar,”Peran Badan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Transformasi* , Volume 11, Nomor 1, 2015.h. 23.

<sup>117</sup>Sri Hery Susilowati, “Pendekatan Skala Ekuivalensi Untuk mengukur Kemiskinan”, *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 28, Nomor 2, 2010, h.34.

<sup>118</sup> Dimas,” Pemberdayaan kaum dhuafa Melalui Zakat”, *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Volume 12 Nomor. 2, 2012.h.12

<sup>119</sup> Anitha Nurak, “Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ,Volume 3, Nomor 2, Juli 2010, h.55.

5. Penelitian oleh, Sayed Syahril, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir “Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakamue Gampong Terhadap Penaggulangan Kemiskinan “. Mengatakan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan bantuan keuangan Peumakamue Gampong secara stimulant dan parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penggulangan kemiskinan di provinsi Aceh.<sup>120</sup>




---

<sup>120</sup> Sayed Syahril, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir “Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakamue Gampong Terhadap Penaggulangan Kemiskinan “ *Jurnal Ilmu Ekonomi* , Volume 3, nomor 2, april 2013, h.13.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdullah, Ma'ruf, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Ahmad, Al-Ustaz H. Idris. S.H., *FIQIH SYAFI* "I fiqih islam menurut mazhab syafi" I, cet.3. Jakarta: karya indah, 1986.
- Al-Fauzan ,Shalih Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba dalam syariat islam*, cet. 1, Solo: At-Tibyan, 2002.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- A.Karim, Adiwarman., *Ekonomi Mikro Islam* ,PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Antoni, Muhammad Syafe'I, *Bank Syariah Dari Teori kePraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: edisi VI Pt Asdi Mahasatya, 2006.
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpm, 2010.
- Bambang, Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial, 2015.
- Basyir , A. Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*, Bandung : Al-Ma'arif , 1975.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional*. Jakarta : Cipta Karya ,2011.
- Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, Direktorat Jendral, Jakarta : Cipta Karya ,2007.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah 2020.

- Disperindag, *Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Republik Indonesia*, Pekanbaru: Kanwil Disperindag Provinsi Riau, 1997.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ,Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir
- Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk,*FIKIH ISLAM*,cet.3. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri,2003.
- Etomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, cet. 1 ,Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka,1991.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian*, Bumi Aksara: Jakarta, 2004.
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika,2012.
- HM Muh., Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar Dasar Dan Pengembangan*, Pekanbaru: SUSKA Press, 2008..
- Kasmir, *Kewirausahaan* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2003 .
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan*, Yogyakarta:UPP AMP-YKPN,2003.
- Manan, Muhamad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: dhana bhakti wakaf, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* .Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Meleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.



- Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitin*, Bandung : P.T. Cipta Aditia Bakti, 20014
- Mukhlis, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010.
- Mulyana, Dedi , *Metode Penelitian Kualitatif* , Bnadung : P.T Remaja Rodakarya, 2004)
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* ,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Galia Indonesia ,2009.
- Ningrat, koentjara, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta : Gramedia, 2005.
- Niti, susastro Mulyadi, *Kewirausahaan Dan Managemen Usaha Kecil*, Jakarta : Alvabeta, 2010
- Nn.Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ,Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir,tt.
- Nn. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN, *Penjelasan IV Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*.
- Nn. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*.tt
- Nn. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Penjelasan Petunjuk Teknis Oprasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Penjelasan X Dana Bergulir,tt.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian* , Jakarta: Kencana , 2011.

- Nurbuko, Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara ,2007.
- Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rosdiana Mustafa, *etal.*, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta:CSRC UIN Syarif Hidayatullah,2009.
- Sadono, Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers,2006.
- Said, Moh, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar Pengembangan* , Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol.I Wahbah, *Fiqih Imam Syafi 'I* ,Jakarta : Bumi Aksara ,2010.
- Shihab, M. Quraish ,*Tafsir Al Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta,2015.
- Sugiyono,*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta,2014.
- Sugiyono ,*metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ,R&D*,Bandung : Alafbeta, 2007.
- Suhendri, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutisna, Endang, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teoridan Implementasi* ,Yogyakarta:Gajah MadaUniversityPress,2016.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan* , Jakarta, PT Gramedia Pustaka,2007.
- Tika, H. Moh.Papundu, *Metodologi Riset Bisnis*,Jakarta: Bumi Aksara , 2006.

**JURNAL :**

Dimas, “Pemberdayaan kaum Dhuafa Melalui Zakat” *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol.12, No.2,2012.

Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol. 2, Nomor.1, Juni 2010.

Mustofa, “Mark Up, Bai’bi Tsaman Ajil Dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam”. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No1 juni 2010.

Mimbal.R, “Peran Badan Masyarakat dan Pemerintah Desa(BPMD )dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Transformasi*, Vol. 11 ,No.1, 2015.

Mustofa, “Mark Up, Bai’bi Tsaman Ajil Dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No.1, juni 2010.

Nasution Chaidir, “Sekilas Tentang Ekonom Islam Dan Konvensional”, *IPI :jurnal Asas* ,Vol.2, No.1,2013.

Nurak Anitha, “Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,Vol. 3, No. 2, Juli 2010.

Sayed Syahril, Abu Bakar Hamzah, Muhammad Nasir, “Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakamue Gampong Terhadap Penaggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* ,Vol .3, No. 2, april 2013.

Susilowati Sri Hery, “Pendekatan Skala Ekivalensi Untuk Mengukur Kemiskinan” *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.28, No.2, 2010.

**Website :**

Pelaksanaan Program Nasioal Pemberdayaan pdf, online tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/114957-ID> Diakses Pukul 11:18, (29 Desember 2019).

Sejarah berdirinya PNPM Madiri, dapat diakses di <http://www.SejarahPNPM.com.id/html> diakses tanggal 18,Oktober, 2019

**Al-Qur'an :**

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid&Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif ,Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh.

**Kamus :**

Muda Ahmad A.K.,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, bandung :Reality Publisher, 2006

